

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan lingkungan. Bruce Mitchell mengatakan pengelolaan sumberdaya lingkungan akan mengalami situasi pokok, yaitu<sup>1</sup> ;

- (a) Perubahan (*Change*) : Perencana dan pengelola lingkungan harus selalu siap menghadapi perubahan, baik perubahan itu sendiri maupun perubahan system sosial, ekonomi, dan politik yang sering kali mewarnai proses-proses pengambilan keputusan;
- (b) Kompleksitas (*Complexity*) : Dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan memang sesuatu yang sangat kompleks dan tidak dapat dipahami secara utuh. Perencana dan pengelola harus memahami bahwa tidak semua perubahan lingkungan dapat diprediksikan sebelumnya. Sebagian aspek dapat diprediksikan, tetapi sebagian lain belum dapat dibayangkan apa implikasi perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan lahan gambut menjadi sawah/perumahan. Ada dampak yang tidak dapat diprediksikan.;
- (c) Ketidakpastian (*uncertainty*) : Perencana dan pengambil keputusan harus memahami pula bahwa lingkungan dipenuhi ketidakpastian. Mereka harus berani mengambil keputusan ketika tidak semua informasi dan pemahaman dapat didapat secara utuh. Dalam konteks ini diperlukan kehati-hatian agar semua proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara gegabah.;

---

<sup>1</sup> Bruce Mitchell dkk., *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan* Universitas (Yogyakarta Gadjah Mada Press), 2000, hlm 1.

(d) Konflik (*Conflict*) : Perbedaan dan pertentangan kepentingan seringkali muncul dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Pertentangan tersebut seringkali merefleksasikan perbendaan pandangan, ideologi, dan harapan. Hal ini merupakan tantangan bagi para pengelola lingkungan untuk dapat mengakomodasi berbagai perbedaan serta mencari jalan tengah yang diterima semua pihak. Dalam konteks Indonesia, hakikat pembangunan menurut Emil Salim<sup>2</sup> adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup *pertama*, kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan dan lain-lain; *kedua*, kemajuan batiniah, seperti Pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; *ketiga*, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Lebih jauh Emil Salim<sup>3</sup> mengatakan bahwa sungguhpun pembangunan telah berjalan ratusan tahun di dunia, namun baru pada permulaan tahun tujuh puluhan ini, dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga mulai menanganinya secara sungguh-sungguh sebagai masalah dunia. Dengan demikian, lingkungan dan pembangunan yang terdapat di negara-negara maju dan negara-negara berkembang mempunyai perbedaan dari sudut pandangnya. Menurut Emil Salim masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurang terbukanya kesempatan kerja yang baik, tingkat Pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumberdaya alam bagi kehidupan hidupnya<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES), Cetakan Keenam, 1993, hlm 3.

<sup>3</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya), Cetakan 10, 1995, hlm 11.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 15.

Dalam permasalahan tersebut, Hal ini telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan kemitraan lingkungan disamping itu perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah. Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan secara terus-menerus menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Kualitas sanitasi, pengolahan sampah, keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan kesadaran masyarakat atas perubahan iklim menjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh para pejabat kota di Indonesia. Karena itu, unsur utama yang harus dimiliki pelaku pemerintahan ini adalah kemampuan dan konsistensi identifikasi persoalan lingkungan

UUD 1945 telah menetapkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa peningkatan volume air limbah domestik dapat berdampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat Dani A. Hakim<sup>5</sup> pada jumatnya.menyatakan. Untuk mencapai hal tersebut, UUD 1945 memberikan wewenang penuh kepada negara secara eksklusif untuk menguasai sumberdaya alam yang terdapat pada wilayah NKRI dan menjaga lingkungan hidup demi memenuhi kesejahteraan warga negaranya, yang dalam hukum dikenal dengan hak menguasai negara. Korelasi antara lingkungan hidup dan sumberdaya alam sebagaimana tertuang pada

---

<sup>5</sup> Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 23 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Semarang:Universitas Negeri Semaarang). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum No. 2, November 2019.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini menandakan pemerintah daerah sangat berperan penting dalam pengelolaan maupun kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan daerah yang bersangkutan, hal ini bisa terlihat dalam bagaimana pemerintah tersebut mengambil kebijakan/keputusan maupun peraturan yang pasti akan sangat berkaitan.

Telah dijelaskan sebelumnya, masalah-masalah lingkungan diatas membentuk suatu energi yang berfungsi sebagai pendorong dalam melatar belakangi dampak pengrusakan lingkungan yang terjadi pada zaman sekarang. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).<sup>6</sup> Akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan pengrusakan lingkungan hidup. Perbedaan masalah lingkungan kedalam dua bentuk ini dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). UUPLH juga hanya mengenal dua bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu : pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.<sup>7</sup>

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dan lain-lain termasuk Peraturan Daerah kabupaten/kota, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah

---

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), 2011, hlm 1.

harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dinyatakan bahwa “ Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana didalamnya terdapat sub urusan mengenai air limbah domestik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan urusan mengenai air limbah domestik tersebut, Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang mengatur secara teknis mengenai pengelolaan air limbah domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T).<sup>8</sup>

Dari kedua jenis sistem tersebut, mayoritas di Indonesia pada saat ini menggunakan SPALD-S dengan membangun tangki septik sebagai penampungan air limbah domestiknya. Air limbah domestik yang ditampung pada tangki septik tersebut akan mengalami pengolahan yang pada akhirnya menghasilkan lumpur tinja. Pada tangki septik yang sesuai standar (kedap), lumpur tinja tersebut lama kelamaan akan terakumulasi di dasar tangki sehingga lambat laun tangki septik akan menjadi penuh. Oleh karena itu, pada saat tersebut harus dilakukan penyedotan. Sebab jika tidak dilakukan penyedotan, maka akan terjadi arus balik dari tangki septik ke dalam kakus. Untuk itu, penyedotan lumpur tinja merupakan suatu layanan yang perlu disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat. Agar layanan lumpur tinja dapat diimplementasikan dengan mudah, terukur, menyeluruh, dan berkesinambungan, maka

---

<sup>8</sup> Rapenda pengelolaan kakus hlm 9

penanganan yang dilakukan harus meliputi aspek regulasi, manajemen dan kelembagaan, teknis operasional, finansial, peran aktif masyarakat, dan pemantauan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara yuridis dan kostitusiaonal Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota mempunyai kewenangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat berwenang untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Domestik<sup>9</sup>

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat pun telah mewujudkan semua yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi terkait pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (desentralisasi) tersebut. Kabupaten Bandung Barat memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya menjalankan roda pemerintahan dengan mewujudkan asas demokrasi. Memang tetapi ada beberapa kewenangan yang memang tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti yang disebutkan dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah seperti urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolute terdiri dari : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional dan agama.<sup>10</sup>

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara legitimatis berhak untuk mengeluarkan produk hukum untuk menunjang untuk kemasyalahatan warganya. Salah satu produk hukum yang diciptakan untuk kejelasan tujuan hukum dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengolahan kakus.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 10

<sup>10</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm.10



Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 ini adalah mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera; mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup; dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa umum pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Maksud diadakannya Peraturan Daerah tersebut ialah akan menjadikan pengelolaan air limbah domestik ini sebagai upaya pengendalian terhadap air limbah yang dibuang agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.<sup>11</sup>

Permasalahan air limbah domestik menjadi permasalahan pelik bagi sejumlah kota-kota besar. Semakin padatnya penduduk dan semakin berkembangnya industri di suatu kota besar, dapat mengindikasikan semakin besarnya limbah yang dihasilkan. Hal lainnya yang dapat berpotensi terhadap kerusakan lingkungan di perkotaan yaitu kurangnya peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup seperti belum terbangunnya jaringan pengolahan limbah cair domestik sistem terpusat di kawasan perkotaan dan pengolahan air limbah cair domestik menggunakan *septic tank* yang tidak sesuai dengan standar, hal tersebut dapat mengakibatkan akumulasi air limbah makin bertambah pada pencemaran terhadap tanah, air tanah dan air permukaan.<sup>12</sup>

Dampak negatif dari pencemaran air limbah lainnya yaitu mempunyai nilai (biaya) ekonomik, di samping nilai ekologi, dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pengolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengolahan kakus, hlm 6

<sup>12</sup> Naskah Akademik Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Pengolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengolahan kakus, hlm 3

menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>13</sup> telah memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk ikut andil dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di daerah diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan daerah berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup yang harus didukung atas kerjasama yang erat serta memiliki komitmen yang kuat antar lembaga/instansi yang berkaitan dengan sosial, kultur maupun kependudukan, sehingga kendala yang dihadapi dapat diatasi. Kemudian hal lain yang menjadi kendala ialah tahapan penerbitan peraturan daerah tersebut yang terkesan mendahului peraturan.

Pada tanggal yang berbeda juga dibahas oleh Hilman Kamaludin. Pada Jumat, 4 Oktober 2019, yang diupload dalam situs berita online Jabar Tribbun News yang membahas tentang DLH KBB Pastikan Sumur Warga di Padalarang Tak Tercemar Limbah, Warga Keluhkan Kerap Berwarna Hitam kemudian di konfirmasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan sumur warga di Kampung Sudimampir, RT 1/1, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang tidak tercemar limbah pabrik. Sebelumnya, sumur di kampung tersebut diduga tercemar limbah dan warga pun melaporkan terkait pencemaran tersebut ke DLH KBB karena air dalam sumur itu kerap berwarna hitam. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada DLH KBB, Aam Wiriawan, mengatakan, tidak tercemarnya sumur tersebut diketahui setelah pihaknya melakukan uji laboratorium dengan mengambil sampel air dari tiga sumur. "Jadi, laporan warga terkait pencemaran sumur itu tidak terbukti karena hasil uji laboratorium hasilnya

---

<sup>13</sup> Undang – undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



masih di bawah baku mutu," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (4/10/2019).

Terkait hal tersebut, pihaknya juga telah menunjukkan hasil uji laboratorium tersebut ke pihak warga yang melaporkan adanya pencemaran limbah pabrik pada sumur mereka. "Iya, sudah kami sampaikan dan warga juga sudah menerima dan tidak ada masalah karena kalau adanya pencemaran harus ada gangguan kesehatan," katanya. Sebelumnya, warga Kampung Sudimampir, Mamen (53) mengatakan, sumur bor yang dibangun swadaya oleh masyarakat pada 2018 lalu itu memiliki kualitas air yang relatif bagus dan bisa dikonsumsi untuk minum. "Namun, sejak Maret 2019, terdapat butiran-butiran kuning di dalam air dan menggumpal dan sering mengendap di paralon jadi harus dibersihkan," katanya. Ia mengatakan, sumur bor swadaya tersebut digunakan kurang lebih oleh 30 warga di RT tersebut. Namun saat ini jumlah penggunaanya berkurang karena ada gumpalan di dalam air tersebut. "Jadi seringkali menghambat jalannya air, memang kampung ini bersebelahan dengan sebuah pabrik," ucapnya.<sup>14</sup>

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB, Apung Hadiat Purwoko, mengatakan, dengan adanya pabrik yang masih kucing-kucingan dengan petugas DLH maupun Satgas Citarum Harum itu karena selama ini kurang pengawasan. "Kita terbantu dengan adanya Satgas Citarum, tapi pengelola pabrik ini selalu kucing-kucingan saat membuang limbah kotor. Biasanya mereka membuang limbah saat malam hari," ujarnya saat ditemui di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Kamis (17/10/2019). Apung mengakui selama ini pihaknya kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pengawasan bagi pabrik-pabrik nakal yang ada di KBB, sehingga pihaknya harus meminta bantuan ke Pemprov Jabar. Dia mengatakan, DLH KBB saat ini tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, sehingga hal itu menjadi kendala untuk melakukan pengawasan bagi pabrik yang kerap membuang

---

<sup>14</sup> <https://jabar.tribunnews.com/2019/10/04/dlh-kbb-pastikan-sumur-warga-di-padalarangtaktercemar-limbah-warga-keluhkan-kerap-berwarna-hitam> (di akses 06:05, Selasa 22 Oktober 2019).

limbah kotor tersebut. "Kita juga kekurangan sarana dan prasarana untuk pemantauan, padahal di KBB ada 70 pabrik yang harus kita pantau terkait pembuangan limbah ini," katanya. Selama ini pihaknya hanya bisa sebatas memberikan pembinaan secara intensif bagi semua pengelola pabrik yang ada di Bandung Barat tersebut. Namun karena kurangnya pengawasan, kata dia, hingga saat ini masih ada pabrik yang membuang limbah tanpa proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). "Jadi kalau masih ada pabrik yang kucing-kucingan kami membutuhkan bantuan juga dari masyarakat untuk melakukan pengawasan," kata Apung.<sup>15</sup>

Permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Bandung Barat cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum disediakan merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.<sup>16</sup> Dalam hal ini Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang sebelumnya dibahas di dalam Perda KBB No 10 Tahun 2016 mencakup pengelolaan serta penyedotan air tinja telah di sahkan oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat. Namun setelah melakukan wawancara di Kompleks Pemda KBB dengan Kasubag Limbah yang termasuk dalam Dinas PUPR, Bapak Alan. Bapak Alan menjelaskan terkait bagaimana peristiwa itu terjadi karena belum dilaksanakannya Perda terkait, karena dalam hal pengadaan IPLT, belum bisa di realisasikan.<sup>17</sup>

Dalam hal ini Siyasah Dusturiyah yang merupakan salah satu macam cabang Fiqh Siyasah yang membahas mengenai Konstitusi atau Perundang – undangan suatu negara. Dalam konstitusi tersebut harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.yang dalam hal itu tertuang dalam prinsip *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* "kebijaksanaan pemimpin sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat"<sup>18</sup>. Kemudian dalam membahas terkait dengan

<sup>15</sup><https://www.ayobandung.com/read/2019/10/17/67306/pabrik-di-kbb-buang-limbah-malam-hari> (di akses 06:05, Selasa 22 Oktober 2019).

<sup>16</sup> Wawancara dengan kabag biro hukum Sekda pak Bambang, di kompleks Pemda KBB dalam menyikapi peraturan daerah No 10 tahun 2019 (senin, 8 desember 2020)

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kasubid Limbah dan Sanitasi Dinas PUPR KBB Bapak Alan di kompleks Pemda KBB dalam menyikapi peraturan daerah No 10 tahun 2019 (Senin 15 Juni 2020)

<sup>18</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana), 2003, hlm. 47

mekanisme pembuatan peraturan perundang – undangan dalam Siyasah dalam salah satu kajian legislasi islam adalah sebagai prinsip utama yang menjadi pembatas dan pengarah perumusan peraturan dalam hal ini kan menjamin ketepatan proses pembentukan suatu peraturan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas sebelumnya,. Maka dari itu peneliti tertarik dalam mengambil judul :

**“ Tinjauan Siyasah Dusturiyah Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Air Limbah Domestik Dan Retribusi Penyediaan Dan/atau Pengolahan Kakus”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah penelitian adalah banyaknya permasalahan terkait dengan tata kelola air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat yang menimbulkan masalah peningkatan air limbah domestic, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang berisi pengaturan tata kelola dan ketentuan pengelolaan air limbah dan retribusi penyedotan kakus di Kabupaten Bandung Barat yang daripada itu selanjutnya dapat di rumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana substansi dalam peraturan daerah yang terdapat dalam perda air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengolahan kakus?
2. Bagaimana penyusunan Perda No 10 tahun 2016 Tentang Pengolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengolahan kakus?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap substansi dan proses penyusunan Peraturan Daerah No 10 tahun 2016 tentang Pengolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengolahan kakus ?

**C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini diarahkan sebagai upaya menyajikan suatu gambaran hasil penelitian lapangan yang secara material sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitiannya antara lain:

1. Untuk mengetahui substansi dalam peraturan daerah yang terdapat dalam perda air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengolahan kakus.
2. Untuk mengetahui penyusunan Perda No 10 tahun 2016 Tentang Pengolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengolahan kakus.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap substansi dan proses penyusunan perda No 10 tahun 2016 tentang Pengolaan air limbah domestik dan retribusi penyediaan dan/atau pengolahan kakus.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca akan mendapat manfaat positif dari hasil bacaan yang peneliti suguhkan. Maka dari itu, berikut manfaat-manfaat yang dapat diambil berupa :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini bisa memberikan wawasan pengetahuan dan sumbangan terkait sumber legalitas hukum. Halnya lebih di khususkan ialah hukum terkait Pengelolaan air limbah domestik serta Retribusi dan/atau pengeloan kakus di Kabupaten Bandung Barat.
  - b. Diharapkan bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas berkaitan dengan regulasi/tahapan terkait dengan pembuatan produk hukum khususnya Peraturan Daerah.
  - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Siyasah Dusturiyah yang diimplementasikan dalam suatu ruang lingkup kenegaraan khususnya dalam study contoh konstitusi peraturan daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara.
- b. Hasil dari penelitian ini bisa menjadi tolak ukur acuan ataupun masukan, pedoman serta bahan pembelajaran berbagai kalangan khususnya oleh Dinas Cipta Kaya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR dalam hal mengatasi permasalahan – permasalahan terkait berhubungan dengan Pengelolaan air limbah domestik serta Retribusi dan/atau pengeloan kakus di Kabupaten Bandung Barat.
- c. Hasil manfaat penelitian yang sama juga demikian kepada masyarakat agar mengetahui informasi terkait dengan Perda tersebut. Lalu berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan dan penerapan jangka Panjang dalam mengimplentasi Peraturan Daerah tersebut.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ide dasar *rechtsstaat* (negara hukum) yang dianut oleh negara Belanda yang membahas dasar-dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas dengan landasan *wetgever* sebagai hukum positif adalah hal yang penting dalam menjamin keselamatan hukum bagi rakyat. Dalam tradisi hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum *eropa kontinental* (hukum perdata), seperti Indonesia, persetujuan undang-undang adalah salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip negara hukum. Dalam pasal 1 Ayat (3) Perubahan Keempat UUD 1945 menentukan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".<sup>19</sup> Ketentuan ini merupakan penegasan dari cita-cita ayah pendiri, yaitu Negara Indonesia yang dicita-citakan adalah sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang mengatur atas dasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penghargaan yang tinggi terhadap perundangan-undangan menjadi salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental.

Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum yang melibatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur produk hukum sebagai sendi utama sistem hukumnya<sup>20</sup>. Karena itu, negara-negara yang bergantung pada sistem hukum

---

<sup>19</sup> Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, (Malang: Setara Press), 2015, hlm 1

kontinental selalu memerlukan hukum-hukumnya dalam bentuk sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang (kodifikasi), sering digunakan juga dengan sistem hukum kodifikasi (codified law).<sup>21</sup> Sementara dalam perkembangannya di negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* (*common law*) juga mulai mengakui keunggulan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara sekarang ini.<sup>22</sup> Dalam implementasi ide negara hukum, undang-undang mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) modern, fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan<sup>23</sup>

Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hirarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.<sup>24</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan<sup>25</sup> bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri.

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-hill), 1992, hlm 6

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2006, hlm 91

<sup>23</sup> Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan kebijakan dalam Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press), 2005, hlm. 17

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm 96

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Op.Cit*, hlm 8



Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya

- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian maka bagaimana undang-undang itu dibentuk dan apa isi dari undang-undang itu ditentukan oleh peraturan perundangan di atasnya yang lebih tinggi, yaitu Konstitusi Dalam sistem norma hukum Indonesia, undang-undang menempati urutan ketiga dari jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>26</sup>

Sebagai norma hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang berfungsi untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang

---

<sup>26</sup> Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

masih berupa aturan-aturan dasar. Di samping itu undang-undang sebagai salah satu produk hukum dalam suatu negara mempunyai fungsi sebagaimana fungsi hukum pada umumnya. Fungsi undang-undang ini sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara. Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah: (a) sebagai pengatur masyarakat; (b) untuk membatasi kekuasaan; (c) sebagai a tool of social engineering; (d) sebagai sarana pembaharuan masyarakat<sup>27</sup>

Dalam rangka penetapan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan daerah harus memenuhi syarat baik material dan formal. Batasan atas prinsip seluas-luasnya hanya menyangkut hal-hal yang oleh UU diserahkan kepada instansi yang lebih tinggi, seperti yang dimuat dalam pasal 38, maka pembatasan pembatasan itu meliputi :

1. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Peraturan daerah tidak boleh mengatur pokok-pokok yang diaturnya kemudian diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.<sup>28</sup>

Batasan dalam hal Penegakan Hukum Lingkungan didefinisikan sebagai bentuk pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan, keperdataan, untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu. Berangkat dari ulasan tersebut, maka lebih khusus A. Hamzah memberikan pandangan bahwa penegakan hukum (*law enforcement; handhaving*) lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulation chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut :

- a. Perundang-undangan (*legislation; wet en regelgeving*)
- b. Penentuan standar (*standar; setting; normzetting*)
- c. Pemberian izin (*licencing; vergunning-verlening*)
- d. Penerapan (*implementation; uitvoering*)

---

<sup>27</sup> Saefudin, *Partisipasi Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undnagan*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009, hlm 47

<sup>28</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta; Rajawali pers). 2014. Hlm. 115

e. Penegakan hukum (*law enforcement; rechsthandhaving*)

Peraturan perundang-undangan baik ditingkatkan lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu diadakan penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Maka penelitian ini pula bisa diteliti di sudut pandang dikemukakan terkait efektifitas hukum, yang didefinisikan sebagai “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memenuhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.” Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum<sup>29</sup>, yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum, dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Berkenaan dengan kehidupan bernegara,. Al-qur'an hanya memakukan tata nilai, demikian pula As-sunnah. Sebagai contoh, nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya alqur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide

---

<sup>29</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Rajagrafindo Persada), hlm 301.

dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).<sup>30</sup> Maka dari itu, objek kajian Permasalahan didalam *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara yang lain, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antara negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.<sup>31</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaturan merupakan suatu kata kerja, asal dari kata "Aturan" yang mempunyai makna hasil perbuatan mengatur; (segala sesuatu) yang sudah diatur; cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut; tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan; adat sopan santun; ketertiban. Dalam hal ini Pengaturan didefinisikan sebagai suatu cara, proses, mengatur.<sup>32</sup>

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah yang dimaknai dengan suatu hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Dalam hal ini biasa dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi pesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan demi terwujudnya kemaslahatan umat/rakyat didalam setiap wilayah Negara Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemimpin/pemerintah yang tertuang dalam perda tersebut semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan bagi negara, daerah, dan rakyatnya. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. (Bandung; CV. Pustaka Setia) 2008. Hlm. 13.

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Op. Cit. Hlm. 47

<sup>32</sup> KBBI

dampak positif yang kongkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan nash-nash yang ada dalam al-Quran maupun as-Sunnah, terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.<sup>33</sup>

Pelaksanaan peraturan dalam kajian fiqh siyasah disebut juga dengan konsep tanfidziyah, konsep tanfidziyah ini untuk menjalankan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-qur'an dan As-sunnah untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari.<sup>34</sup> Adapun prinsip-prinsip/ kaidah fiqh siyasah yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Prinsip pembuatan Peraturan

الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

*“Segala peraturan tergantung kepada maksud dan tujuan pembuatannya”*

Kaidah ini berkaitan dengan maksud dan tujuan pembuatan Peraturan Daerah itu sendiri. Peneliti tertarik untuk menelaah secara maksud dan tujuan Peraturan Daerah tersebut di buat.

Maka dari hal tersebut penulis menghubungkan masalah sebelumnya ke dalam teori-teori siyasah dusturiyah yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut adalah

##### a. Teori Tasry (Legislasi Islam)

Dalam Legislasi Islam.terdapat sumber yang menjadi patokan dalam menganalisisnya sumber di sini adalah referensi materi legislasi. Kemudian didalam legislasi islam juga terdapat asas. Asas legislasi Islam berupa prinsip-prinsip utama yang menjadi pembatas dan pengarah perumusan peraturan

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani. *Op Cit.*, hlm. 27

<sup>34</sup> Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2015, hlm 2-5

(tasyri'). Peletakan legislasi di atas asas-asasnya akan menjamin ketepatan proses pembuatan peraturan.<sup>35</sup> Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Asas Ketuhanan
2. Asas Persamaan
3. Asas Keadilan
4. Asas Musyawarah
5. Asas kebebasan

Hal lain yang dapat menunjang suatu pembuatan peraturan hukum, dalam legislasi islam pula terdapat beberapa acuan – acuan yang menjadi tolak ukur suatu peraturan, Adapun acuan – acuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>.

1. Maksud Teks Hukum
2. Realitas Social.
3. Proposional Antara Maslahat Dan Mafsadat.
4. Prioritas Konten Peraturan.
5. Tuntutan Perubahan

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun studi maupun pembahasan terkait dengan undang undang yang berkaitan dengan pengelolaan air sebelumnya yang pernah dilakukan berikut:

No	Penulis	Topik Penelitian
1.	Ari Ardiyansah	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bandung di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah.
2.	Wimpy Erika	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya

---

<sup>36</sup> Ibid hlm 15.



		Dan Beracun Dalam Mewujudkan Kota Yang Unggul, Nyaman Dan Sejahtera
--	--	---

Terkait dengan penelitian – penelitian diatas, peneliti telah merumuskan terkait garis besar konklusi dalam peneletian tersebut yang terdapat perbedaan maupun persamaan, berikut garis besarnya :

1. Penelitian yang pertama ialah dari Ari Ardiyansah yang membahas Implementasi Peraturan Daerah mengenai Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bandung. Peneliti menemukan bagaimana implementasi perda itu dilakukan, serta bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Perda tersebut dijalankan.
2. Penelitian yang kedua ialah dari Wimpy Erika yang membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dalam Mewujudkan Kota Yang Unggul, Nyaman Dan Sejahtera di Kota Bandung. Peneliti menemukan peraturan daerah yang sudah ada tidak membedakan antara limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan oleh perusahaan atau rumah sakit dengan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan atau rumah sakit dengan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga karena jumlahnya pun berbeda. Kurangnya anggaran, sarana prasarana kemudian kurang sadar nya masyarakat dan peduli terhadap lingkungan dan kemudian kebudayaan dengan membuang sampah.

Setelah membahas penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan Perbedaan berupa sumber dan produk hukum yang berbeda. Peneliti mengambil produk hukum berasal dari daerah kabupaten Bandung Barat, yakni berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengolahan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Pengolahan Kakus. Hal lain yang menjadi perbedaan bahwa dalam sumber hukum tersebut yang dibahas oleh peneliti ialah berupa kajian materi, substansi dan kebijakan dalam pengeluaran produk hukum tersebut. Dalam hal persamaan penelitian, ketiga peneliti sama-sama memiliki kajian formil berupa tinjauan dari perspektif Siyasah Dusturiyah yang menjadi sumber acuan dalam hal perundang-undangan.